

**DAMPAK KEHADIRAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN
PT. MUSIM MAS TERHADAP KONDISI DESA TANJUNG BERINGIN
KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN
TAHUN 2016 - 2021**

**Oleh : Muamar
Dosen Pembimbing :
DR. Hasanuddin, M.Si.**

Abstract

This study aims to describe the supervision of money politics in the 2019 legislative general election conducted by the Pekanbaru City Bawaslu and to find out what factors influence the process of monitoring money politics in the 2019 legislative general election by the Pekanbaru City Bawaslu. The approach used in this research is a qualitative approach with a descriptive type, the place of research is the Pekanbaru City Election Supervisory Board. Data collection techniques using the method of observation, interviews, and documentation. The data analysis technique uses descriptive qualitative analysis starting from problem formulation, data collection, data reduction, data presentation to drawing conclusions. Test the validity of the data using triangulation and checking techniques.

Based on the results of the study, it can be concluded that the supervision of money politics carried out by the Pekanbaru City Bawaslu in the 2019 Legislative Election in Pekanbaru City in this study, the first is in the form of Preparation Stages for Election Oversight which at this stage is divided into 5 categories, namely: Preparation for Supervision, Division of Supervisory Implementers, Locus and Focus of Supervision, Regulation/Assessment of Political Money, and the last is Controlling Time Management. In accordance with Law no. 7 of 2017 which states that Bawaslu focuses on monitoring money politics on prevention efforts, which consist of monitoring plans and monitoring activities. Of the 5 stages above, according to the researcher, the preparation stage for monitoring money politics is the most crucial in conducting supervision. After optimal preparation, the next step is to evaluate. Assessment is intended to compare plans with achievements. According to the researcher, Bawaslu's achievements in terms of monitoring money politics have not been maximiz

Supporting factors for the occurrence of Money Politics include: Tradition, ambition of candidates / thirst for power, supportive environment, weak law enforcement, economic factors, and low public knowledge about politics. While the factors that hinder the process of monitoring money politics by the Bawaslu include: Difficulty in proving money politics practices because the formulation and elements of punishment in the legislation are not yet rigid. People tend not to dare to report to the Bawaslu and the Gakkumdu center. Low public awareness and knowledge of the practice of money politics. The author's suggestion is to the Pekanbaru City Bawaslu and the ranks of election organizers to optimize it again in coordinating in terms of supervision so that it is carried out better. Bawaslu must also be able to make maximum efforts to eliminate the factors that are driving the occurrence of money politics. Bawaslu instills a moralistic system, namely prevention through moral punishment or social

witnesses. This system will strengthen moral values so that it is expected to be able to suppress the crime of money politics in the midst of society.

Keywords: *Supervision, Bawaslu, Money Politics*

PENDAHULUAN

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berpendudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.¹ Perusahaan mempunyai fungsi essensial untuk mencapai tujuan, fungsi produksi, pemasaran, keuangan dan fungsi personalia, yang setiap fungsi saling berkaitan satu dengan yang lain. Namun kehadiran perusahaan juga tentunya memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan daerah yang di tempatinya.

Kesejahteraan sosial sebagai kegiatan pertolongan diyakini telah ada sejak masa masyarakat primitif sekalipun dalam bentuk tolong menolong untuk mengatasi masalah yang dihadapi anggotanya. Secara historis, kesejahteraan sosial telah mengakar lama dalam tradisi China, India, Mesir Kuno, Yunani, dan Yahudi. Sekarang ini kesejahteraan sosial menjadi tolak ukur untuk mengetahui maju atau tidaknya suatu daerah.

Otonomi daerah dan desa sebagai salah satu konsep tata pengaturan (*government system*) yang penting dalam sejarah politik pembangunan Indonesia. Dalam konsepnya, sesuai dengan Undang Undang 23 tahun 2014 secara eksplisit mengedepankan cita-cita untuk menegakkan prinsip-prinsip kesetaraan, kesejahteraan,

menghargai prakarsa masyarakat lokal, memperjuangkan kemandirian serta kedaulatan system sosial ekonomi masyarakat lokal. Konsep otonomi lokal daerah juga memberikan platform bagi sistem administrasi pembangunan yang memungkinkan setiap stakeholder mengaktualisasikan pencapaian cita-cita kesejahteraan sosial yang lebih baik serta keberlanjutan lingkungan secara aspiratif. Otonomi daerah memberikan landasan yang memadai bagi semua pihak untuk mengelola system pembangunan melalui proses perumusan kebijakan yang demokratis dan partisipatif, menghargai keberadaan semua pihak terutama komunitas lokal serta menghargai perbedaan pandangan dan pemutusan kebijakan.

Kesejahteraan sosial sebagai kegiatan pelayanan telah dimulai ketika Indonesia belum merdeka. Pada zaman kolonial Belanda, urusan kemiskinan termasuk dalam Departemen Kehakiman. Indonesia memiliki budaya yang beranekaragam dan berbeda-beda disetiap wilayahnya. Hal ini merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia yang memiliki banyak daerah. Struktur terkecil dari daerah tersebut adalah desa. Oleh karena itu, dengan adanya desa ini maka adat istiadat dan budaya yang ada tetap terjaga.²

Desa merupakan daerah yang terdiri satu atau lebih dukuh atau dusun yang digabungkan sehingga

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 1982

² Adi, Isbandi Rukmiyanto, (2013), *Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Rajagrafindo Persada

menjadi suatu daerah yang berdiri sendiri dan mengatur rumah tangganya sendiri. Di Indonesia istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah Kecamatan yang di pimpin oleh Kepala Desa. Desa diartikan sebagai wilayah yang jauh dari keramaian perkotaan dan memiliki kondisi daerah yang masih alami, dihuni oleh penduduk yang relatif jarang dan sebagian besar lahannya dimanfaatkan untuk pertanian ataupun perkebunan. Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

KERANGKA TEORI Pembangunan Desa

Banyak pembahasan yang dinamis tentang pembangunan desa, dan diantara berbagai tema yang berulang-ulang dimunculkan, tiga hal yang penting dan menentukan tentang pembahasan tersebut, yakni⁴

- 1) Pentingnya organisasi lokal yang partisipatif dan beorientasi pada belajar dari pengalaman, yang merupakan salah satu cara pokok untuk menanggulangi kekeliruan-kekeliruan dan ketidakpastian dalam lingkungan pembangunan yang sangat tidak pasti.

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁴ Bryant & White (1987:389)

- 2) Tidak dapat hanya dengan mengandalkan kompetensi teknokratik semata-mata yang dianggap sebagai “pemberesan kilat”. Kompetensi tersebut dianggap menggunakan top down planning yang kecenderungannya bukannya merupakan bagian dari jalan keluar, melainkan justru merupakan bagian dari permasalahan.
- 3) Pentingnya menyimak kebutuhan-kebutuhan yang spesifik dari masyarakat lokal yang dipengaruhi oleh aspek sosial dan budayanya. Kompleksitas budaya lingkungan itu merupakan bagian penting dari kehidupan lokal.

Pembangunan desa sebagai suatu proses yang mempunyai banyak dimensi permasalahan dan penyelesaiannya tidak bersifat instant, lebih jelasnya, yaitu : Bahwa pemecahan yang cepat dan tepat bagi pembangunan desa tidak ada, khususnya jika pembangunan dipahami dalam hubungan dengan kapasitas, keadilan dan penumbuhan kekuasaan (*empowerment*) dalam suatu dunia yang lestari, berkecukupan dan saling bergantung. Dengan demikian siapapun yang terlibat dalam pengelolaan pembangunan desa harus menghindari dua hal yang sangat merugikan yaitu sikap pesimistik dan metode pemecahan yang simplimistik.

Dapat disimpulkan bahwa konsep pembangunan desa telah menempatkan perlakuan terhadap masyarakat dalam pembangunan pada posisi yang begitu berarti dan sentral. Sehingga keterlibatannya dalam proses pembangunan menjadi

titik penentu apakah proses pembangunan itu menjadi wahana proses belajar atau hanya sekedar sebuah rekayasa yang mana pemerintah menjadi pemain tunggal. Dengan demikian penekanan pada aspek “proses” memiliki arti penting. Proses belajar mengandung makna bahwa setiap kekurangan dan kelemahan yang muncul dalam proses pelaksanaan program pembangunan menjadi informasi yang penting dan untuk itu dilakukan upaya-upaya penanggulangannya.

Wujud pembangunan desa adalah adanya berbagai program dan proyek pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan desa. Program dan proyek itu tidak hanya untuk mencapai kemajuan fisik saja, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat. Dengan demikian, makna pembangunan tidak semata-mata mengadakan sesuatu yang baru dalam arti fisik, akan tetapi lebih luas. Sasaran pembangunan desa meliputi perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa, penerahan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta penumbuhan kemampuan untuk berkembang secara mandiri yang mengandung makna kemampuan masyarakat (*empowerment*) untuk dapat mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi serta dapat menyusun perencanaan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari

pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.⁵

Lahirnya reformasi kebijakan desentralisasi pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dimaksudkan agar daerah mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsanya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian kewenangan otonomi harus berdasarkan asas desentralisasi dan dilaksanakan dengan prinsip luas, nyata, dan bertanggung jawab.⁶

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 7 huruf b juga memberikan gambaran dalam pelaksanaan otonomi desa secara luas, nyata, bertanggungjawab, dimana di dalamnya disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang

⁵ Widjaja (2003: 165)

⁶ Hari Sabarno, 2007: 30

diserahkan pengaturannya kepada desa. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi, pembahasan, dan penetapan jenis-jenis kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada desa, seperti kewenangan dibidang pertanian, pertambangan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan.

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya (yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000). Disamping itu keluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Pengertian luas dalam penyelenggaraan otonomi daerah merupakan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup seluruh bidang pemerintahan yang dikecualikan pada bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan agama, serta kewenangan bidang lain.⁷ Kewenangan bidang lain tersebut meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan

sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konversi, dan standarisasi nasional.

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang didaerah. Pemerintah daerah selain berperan melindungi masyarakat dan menyerap aspirasi masyarakat juga harus mampu mengelola berbagai kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepadanya. Dalam pengelolaan kewenangan yang luas tersebut tetap dibatasi rambu penting dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, otonomi bukanlah semata-mata menggunakan pendekatan administratif atau sekedar meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja saja, akan tetapi sekaligus pendekatan dalam dimensi politik. Dengan demikian, makna kewenangan dibidang pemerintahan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat sejauh mungkin harus dapat dilayani secara dekat dan cepat.

Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam

⁷ Ibid 2007:31

rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dampak Kehadiran Perusahaan Perkebunan di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras dalam penelitian ini ditinjau dari beberapa aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial masyarakat desa. Menurut Bappenas, kesejahteraan sosial ditinjau dari beberapa pembenahan diantaranya fasilitas rumah tangga, pendidikan, kesehatan, telekomunikasi dan kemandirian sumber daya manusia⁸. Dampak yang terbentuk dengan keberadaan industri menurut Shintasari akan memunculkan Dampak positif atau negatif dan akan direfleksikan berbeda pada setiap aktornya yaitu masyarakat, pemerintah desa dan pihak perusahaan⁹.

Dampak Negatif Kehadiran Perusahaan

1. Karyawan dari luar daerah lebih diutamakan dari pada putra daerahnya sendiri. Kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang dirasakan masyarakat sejak kehadiran PT Musim Mas, banyak membawa perubahan yang berdampak pada kehidupan masyarakat secara struktural. Masyarakat saat ini mempunyai pekerjaan baru ada juga mempunyai pekerjaan ganda karena sudah terlibat bekerja

dalam perusahaan. Kenyataan sekarang perusahaan lebih menarik pekerja bukan masyarakat lokal (penduduk asli), karena dari informasi yang diperoleh perusahaan hanya fokus pada keuntungan profit saja tidak terlalu fokus untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Tanjung Beringin. Dampak negatif justru lebih banyak diterima masyarakat dibandingkan dengan dampak positif, sebagai besar penjelasan informan bahwa perusahaan belum dapat meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga karena pendapatan atau gaji yang didapat masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena tidak sesuai upah minimum pekerja.

2. Minimnya bantuan dari perusahaan ke desa. Dampak kehadiran PT Musim Mas terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat memang harus diakui telah membawa pengaruh positif lewat kesempatan bekerja dan berusaha akan tetapi baik penyerapan tenaga kerja maupun bantuan hanya sebagai kecil yang dirasakan sehingga perubahan kehidupan kearah lebih baik lebih banyak dinikmati oleh masyarakat diluar desa Tanjung Beringin seperti penduduk dari kecamatan Pangkalan Lesung, kecamatan Bandar Petalangan yang kini menetap sementara di desa.

3. Terdegradasinya nilai-nilai budaya dan agama masyarakat desa. Kehadiran perusahaan dengan melibatkan banyak pendatang dari luar mengakibatkan kecemburuan sosial, dan secara langsung

⁸ Bappenas. (2015). Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015. Badan Pusat Statistik: Jakarta

⁹ Reni Shintasari (2014). POLITIK CSR "Studi Relasi Pemerintah Desa , Perusahaan, Masyarakat Desa Ponggok terkait CSR PT TI Aqua Aqua Danone, Tesis, UGM: Yogyakarta

merubah gaya hidup perilaku masyarakat dikarenakan mabuk-mabukan dengan masyarakat luar yang bekerja dalam perusahaan. Berdasarkan kenyataannya, tidak dapat dihindari bahwa kini telah terjadi degradasi nilai-nilai agama, budaya serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku selama ini di masyarakat. Aturan-aturan yang mulai tidak dipedulikan dan tidak dijalankan lagi di masyarakat, karena masyarakat lebih memilih lembur kerja ketimbang pergi beribadah. Selain waktu beribadah waktu untuk berkumpul di hari jumat untuk kerja bakti bersama sudah mulai tidak dijalankan lagi karena masyarakat lebih memilih tetap bekerja sehingga dampaknya nilai kekerabatan sebagai sesama masyarakat desa Tanjung Beringin mulai tidak akrab lagi menimbulkan hubungan keluarga dan bermasyarakat menjadi tidak baik. Mentalitas mengagumi materi secara berlebihan merupakan tantangan dan pekerjaan baru kedepan bagi masyarakat desa Tanjung Beringin, sekaligus menjadi tantangan bagi pemuka keagamaan dan pemerintah desa. Dengan demikian memberikan pemahaman- pemahaman baru pada warga agar mampu menyeimbangkan antara material atau pekerjaan dan spiritualitasnya, Meskipun telah memiliki pekerjaan utama masyarakat diharapkan untuk tidak meninggal kebiasaan keikutsertaan bekerjasama sama dalam pemerintahan desa Tanjung Beringin.

Dampak Positif Kehadiran Perusahaan

1. Membaiknya hubungan masyarakat desa tanjung beringin dengan desa tetangga. Sebelum adanya perusahaan dilihat dari aspek sosial pergaulan masyarakat desa Tanjung Beringin belum terlalu terbuka akan tetapi sejak adanya PT. Musim Mas masyarakat didesa yang berbeda mempunyai hubungan yang lebih mendalam tidak terjadi lagi kasus perkelahian konflik seperti dulu lagi karena pertemuan mereka dalam pekerjaan yang sama dalam perusahaan. Ciri-ciri masyarakat desa Tanjung Beringin bisa disebut masyarakat yang homogenitas sosial yang terdiri dari satu atau beberapa kekerabatan saja. Dengan adanya perusahaan maka mendatangkan perubahan pola hidup tingkah laku kebiasaan menjadi lebih dewasa dan baik memang secara tidak langsung pihak perusahaan telah menyatukan beberapa desa yang sempat bermusuhan dengan memperjakan dalam pekerjaan yang sama. Kebersamaan, keserasian dan kedamaian memang sudah seharusnya dijalankan bersama. Secara Teori kehadiran agroindustri dipedesa pastilah membawa dampak atau pengaruh ditengah kehidupan ,masyarakat baik itu bersifat positif maupun negatif, apakah perubahan itu mengarah pada kehidupan masyarakat yang lebih baik artinya terjadi kemajuan atau justru berdampak buruk terjadi kemunduran dalam hal penurunan kesejahteraan masyarakat. Pada masyarakat didesa Tanjung Beringin hubungan kekeluargaan dilakukan secara musyawarah.

Mulai masalah bersama sampai masalah pribadi. Anggota masyarakat satu dengan yang lain saling mengenal secara intim.

2. Desa jadi lebih terbuka terhadap pendatang. Masyarakat asli Desa Tanjung Beringin dengan masyarakat pendatang yang berstatus sebagai pekerja dalam perusahaan merupakan wujud dari sebuah kesatuan hidup bersama. Hubungan baik yang terjalin antara masyarakat asli dan pendatang di desa Tanjung Beringin memiliki kesadaran bahwa mereka saling membutuhkan dan sama-sama memiliki kepentingan. Kepentingan yang ada antara kedua belah pihak memang saling menguntungkan. Masyarakat Desa Tanjung Beringin membutuhkan masyarakat pendatang yang notabene adalah pekerja industri karena mereka merupakan bagian dari pelaku ekonomi di desa Tanjung Beringin. Begitu pula dengan masyarakat pendatang, mereka membutuhkan masyarakat asli Tanjung Beringin agar dalam kelangsungan kehidupan mereka di desa tidak ada gesekan-gesekan masalah yang nantinya akan merugikan mereka sendiri dengan tidak memiliki tempat tinggal yang dekat dengan tempat kerjanya.

Dilihat dari hubungan sosial dalam kesatuan hidup setempat memang baik. Dari mereka saling menghargai dan menghormati keberadaan masing-masing. Rasa menghormati dan menghargai antara mereka diwujudkan dengan pemilihan bahasa yang digunakan untuk berinteraksi, kebanyakan mereka menggunakan bahasa

yang dianggap halus dan sopan. Kenyataannya setelah adanya perusahaan yang ada dari segi positif membawa perubahan baik antara masyarakat asli Tanjung Beringin dan masyarakat pendatang dari luar yang bekerja di perusahaan, selain itu interaksi antara desa Tanjung Beringin dan beberapa desa menjadi semakin baik karena dulunya sebelum adanya perusahaan kehidupan antara desa tetangga kurang berjalan dengan baik. Rasa saling menghargai tersebut menjadi salah satu faktor penekan adanya masalah diantara pihak. Masalah yang dulu muncul ditengah mereka sudah disikapi dengan adil dan bijaksana. Perdamaian telah dilakukan di masyarakat desa Tanjung Beringin dan beberapa desa adalah karena hadirnya Perusahaan ditengah beberapa desa tersebut. Dilihat dari kontak sosial umumnya kontak sosial yang terjadi antara masyarakat asli didesa Tanjung Beringin dengan masyarakat pendatang terjadi secara langsung. Mereka saling bertatap muka dan berkomunikasi secara langsung. Kontak sosial yang dilakukan yaitu mereka saling menyapa, menanyakan kabar, dan menanyakan kegiatan yang sedang dilakukan. Ketika selesai bekerja kontak sosialpun masih terjalin dengan baik. Komunikasi yang baik juga diwujudkan dengan pemilihan bahasa yang digunakan oleh masyarakat asli Tanjung Beringin. Masing-masing dari masyarakat sudah sudah mengerti bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat lain. Bahasa yang halus digunakan oleh masyarakat apabila berkomunikasi dengan

warga pendatang begitu juga sebaliknya. Bahasa halus digunakan oleh mereka tanpa memandang usianya lebih muda atau tua. Hal itu menunjukkan adanya rasa saling menghargai dan menghormati diantara mereka tanpa memandang status dan usia.

3. Keberadaan perusahaan atau industri di desa tanjung beringin meningkatkan pola pikir masyarakat desa terhadap pendidikan. Ditambah perusahaan juga menyumbangkan pembangunan sebuah gedung kelas di SD desa Tanjung Beringin dan memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi. Sehingga masyarakat tidak lagi menganggap enteng pendidikan. Dengan harapan agar masyarakat dapat membantu peningkatan Sumber Daya Manusia yang mana sesuai dengan salah satu tujuan perusahaan PT. Musim Mas yang dituangkan dalam CSR perusahaan.¹⁰

Kondisi Yang Diharapkan Atas Kehadiran PT. Musim Mas

1. Pembinaan Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah atau Masyarakat¹¹. Fasilitas kesehatan di

¹⁰ Syamsuddin, "Dampak Berdirinya Perusahaan Kalapa Sawit (PT. Damai Jaya Lestari) Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Tondowolio". (Fakultas Pertanian. Universitas Muhammadiyah Malang), 2011

¹¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.71 (2013) Nasional. Menkes: Jakarta.tentang Pelayanan

Desa Tanjung Kecamatan Pangkalan Kuras menurut Bapak Syafri yang merupakan Kepala Desa Tanjung Beringin mengatakan:

"Desa ini fasilitas kesehatannya dibangun oleh pemerintah, untuk rumah sakit belum ada, rumah sakit adanya di Sorek Satu, jika ada yang ingin melakukan persalinan diarahkan ke poliklinik atau balai pengobatan yang ada bidannya, bidan desa sudah ada sejak 2015 di desa ini. Sejak 2014 tadi kita sudah ada puskesmas pembantu tapi fasilitasnya belum lengkap. Operasional dan pembangunan layanan kesehatan disini bersumber dari dana desa, nah kan belum ada puskesmas jadi pembangunan yang digunakan dari dana desa memang belum ada untuk pembangunannya, tapi kalau pelayanan kesehatan itu sumbernya dana desa."(Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Juli 2019 di Kantor Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras).

Ditambahkan menurut Bapak Yanto,S.Pd yang merupakan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Beringin mengatakan:

"Fasilitas kesehatan di desa ini masih minim, rumah sakit belum ada, pelayanan kesehatan di dapatkan dari puskesmas pembantu, praktek dokter mandiri atau bidan desa, posyandu di Desa ada itu melayani untuk anak-anak balita, nah kan ada kader posyandu itu yang dibina oleh tenaga kesehatan sebelumnya. Mengenai pembangunan fasilitas kesehatan sependapat saya dari

Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. Menkes: Jakarta.

dana APBD bukan dari CSR perusahaan atau sumber lainnya”(Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Juli 2019 di Kantor Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras).

Selain itu dilakukan wawancara kepada Humas PT. Musim Mas menurut Bapak Jeremy Liu yang merupakan Manager Hubungan Masyarakat PT. Musim Mas mengatakan:

“Hubungan perusahaan untuk memberikan kontribusi kepada desa itu melalui program *corporate social responsibility* (CSR), untuk fasilitas kesehatan PT. Musim Mas memang belum ada menyediakan anggaran CSR membangun rumah sakit atau puskesmas begitu di Desa Tanjung Beringin, ” (Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Juli 2019 di PT. Musim Mas).

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa fasilitas kesehatan di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras tahun 2019 adalah berupa puskesmas pembantu, posyandu, praktek dokter mandiri, dan bidan desa artinya fasilitas kesehatan dasar seperti puskesmas utama dan rumah sakit belum ada. Belum terdapat pembangunan fasilitas kesehatan, namun dalam aktivitas kesehatan dilakukan oleh profesional seperti dokter dan bidan yang menyelenggarakan praktek pelayanan kesehatan secara mandiri. Selain itu, diketahui pula dana CSR (*corporate social responsibility*) dari perusahaan juga memiliki alokasi khusus terhadap desa terdekat.

Salah satu solusi dalam meningkatkan pemberdayaan dan

pembangunan masyarakat desa adalah dengan memanfaatkan peran aktif pihak ketiga atau Swasta melalui peran CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang lebih dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atas keberadaannya beroperasi pada sebuah wilayah¹². Peraturan pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dimana tanggung jawab perusahaan adalah melanjutkan komitmen sebagai bisnis untuk bersikap secara ethnic, bermoral dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas kehidupan dan tenaga kerja dan keluarganya maupun komunitas lokal dan masyarakat.

Perusahaan harus mengintegrasikan antara kegiatan sosial dan masalah lingkungan yang berhubungan dengan operasi bisnis. Dalam perkembangannya, pembangunan yang ada berjalan lamban, belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat secara merata dan menyeluruh, masih banyak infrastruktur jalan yang rusak, fasilitas umum minim dan sarana prasarana desa yang belum lengkap serta sarana transportasi dan alat komunikasi yang belum memadai.

Anggaran CSR PT. Musim Mas untuk pembangunan fasilitas kesehatan dari hasil wawancara kepada Humas PT. Musim Mas menurut Bapak Jeremy Liu yang merupakan Manager Hubungan

¹² Sri Murni, Jamal Amin, Nur Fitriyah, (2015), Peranan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa Di Desa Lung Anai Kecamatan Loa Kulu, *Jurnal Administrative Reform*, Vol. 3, No.1

Masyarakat PT. Musim Mas mengatakan:

“Anggaran khusus untuk rumah sakit, puskesmas itu belum ada, tapi akan kita wacanakan lagi karena beberapa waktu belakangan kita fokus pada jalan dan akses” **(Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Juli 2019 di PT. Musim Mas).**

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa anggaran CSR PT. Musim Mas memang belum dialokasikan untuk pembangunan fasilitas kesehatan di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras.

2. Pembangunan Meningkat

Pembangunan dapat dilihat secara fisik dan non fisik yang dilaksanakan di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras. Menurut Badan Pusat Statistik indikator pembangunan meningkat dapat dilihat dari indikator susenas inti yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut:¹³

- a. Pendidikan, dengan indikator: tingkat pendidikan, tingkat melek huruf, dan tingkat partisipasi pendidikan.
- b. Kesehatan, dengan indikator: rata-rata hari sakit dan fasilitas kesehatan yang tersedia
- c. Perumahan, dengan indikator: sumber air bersih dan listrik, sanitasi, dan kualitas tempat tinggal.
- d. Angkatan Kerja, dengan indikator: partisipasi tenaga kerja, jumlah jam kerja, sumber penghasilan utama, dan status pekerjaan

- e. Keluarga Berencana dan Fertilitas, dengan indikator: penggunaan ASI, tingkat imunisasi, kehadiran tenaga kesehatan pada kelahiran, dan penggunaan alat kontrasepsi.
- f. Ekonomi, dengan indikator: tingkat konsumsi per kapita.
- g. Kriminalitas, dengan indikator: angka kriminalitas per tahun
- h. Perjalanan wisata, dengan indikator: frekuensi perjalanan wisata per tahun.
- i. Akses ke media massa, dengan indikator: jumlah surat kabar, jumlah radio, dan jumlah televisi.

Peningkatan pembangunan diketahui dengan beberapa aspek diatas diidentifikasi dari hasil wawancara dengan Bapak Syafri selaku kepala desa Desa Tanjung Beringin mengatakan:

“untuk pendidikan hanya memiliki satu bangunan sekolah yaitu SD. Masih minim disini anak-anak sekolah pergi ke kecamatan karena disana baru ada SMP dan SMA nya. Ini harusnya sudah jadi perhatian pemerintah. Kalau relasi ke PT.MM belum ada mengarah ke pembangunan sekolah, baru beasiswa saja, tapi membangun sekolah tidak ada” **(Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Juli 2019 di Kantor Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras).**

Ditambahkan menurut Bapak Yanto,S.Pd yang merupakan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Beringin mengatakan:

“Pembangunan pendidikan di Desa Tanjung Beringin belum optimal, masih sangat minim sekali sarana belajar, SMP, SMA bahkan Madrasah Aliyah tidak ada disini. Anak-anak SD kalau

¹³ Prof. Lincoln Arsyad, (2014), *Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga

tamat mereka melanjutkan sekolah ke kota atau ke Pangkalan Kuras. Sebagian orang tua mengeluhkan karena jauh adanya yang tidak dapat pendidikan sembilan tahun. Sayang sekali ini juga belum jadi pusat perhatian bagi pihak mana saja, bukan hanya perusahaan. Sejauh ini APBDes tidak cukup untuk membangun sekolah perlu adanya bantuan dari perusahaan dan *stakeholders*” (Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Juli 2019 di Kantor Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras).

Selain itu dilakukan wawancara kepada Humas PT. Musim Mas menurut Bapak Jeremy Liu yang merupakan Manager Hubungan Masyarakat PT. Musim Mas mengatakan:

“Pembangunan sekolah belum ada dilaksanakan oleh perusahaan. Tapi untuk bantuan pendidikan perusahaan telah laksanakan, beasiswa melalui program beasiswa anak Mas, ini yang mengelola namanya Yayasan Pendidikan Shafiyatul Amaliyyah (YPSA) tiap tahun kita berikan pada anak usia sekolah yang kurang mampu. Selain itu, ada juga Musim Mas Scholarship Program, tapi untuk scholarship program ini yang di Desa Tanjung Beringin belum ada yang dapat tapi di daerah lain, karena pengelolaannya ini dari pusat, bukan daerah jadi saya kurang banyak mengetahui. Tapi informasi ini bisa diakses terbuka di internet situsnya ypsa.id ” (Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Juli 2019 di PT. Musim Mas).

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa fasilitas pendidikan di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras masih kurang memadai karena hanya terdapat satu bangunan sekolah dasar (SD), sementara itu untuk pengembangan pembiayaan pendidikan PT Musim Mas telah melakukan program beasiswa yang dikelola langsung di pusat.

Otoritas kelola beasiswa pendidikan yang dilakukan langsung di yayasan pusat memang lebih objektif untuk menjaring penerima bantuan, namun kelemahannya akan meminimalisir kesempatan bagi anak daerah khusus Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras, hal ini dikarenakan seleksi yang dilaksanakan secara bersama-sama tentu saja memberikan kesempatan yang luas pada masyarakat lain yang tidak hanya berada di daerah perusahaan bermukim. Masyarakat Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras yang tingkat pendidikannya masih rendah tentu akan mempengaruhi informasi yang diterima, apabila dilaksanakan seleksi akan besar kemungkinan tidak terjangkau anak daerah dari Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras.

Selanjutnya pembangunan pada aspek angkatan kerja yang dilihat dari partisipasi tenaga kerja, jumlah jam kerja, sumber penghasilan utama, dan status pekerjaan diketahui bahwa sebagai berikut:

Tabel 3.1 Partisipasi Tenaga Kerja Desa Tanjung Beringin

Tahun	Lapangan Usaha/Pekerjaan			Mengikuti KKPA dengan PT Musim Mas	Belum / Tidak bekerja
	Pertanian	Industri Pengolahan	Perdagangan		

2017	328	0	23	131	12
2018	341	0	21	155	17
2019	376	0	19	201	34

Sumber : Kantor Desa Tanjung Beringin (2019)

Berdasarkan tabel 3.1 diketahui bahwa partisipasi tenaga kerja desa tanjung Beringin pada umumnya adalah sektor pertanian dengan 328 keluarga dan terdapat 131 diantaranya yang bergabung dalam KKPA yang dikelola oleh PT Musim Mas.

Hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat Bapak Riko selaku Tokoh Masyarakat Desa Tanjung Beringin mengatakan:

“Masyarakat desa di sini umumnya adalah petani, peningkatan secara ekonomi memang sangat terasa sejak adanya perusahaan Musim Mas ini, tetapi kalau pembangunan lain itu untuk akses jalan, untuk pendidikan menurut saya belum. Fokus perusahaan sepertinya untuk lahan sawit itu sistemnya membeli ke petani, petani yang banyak lahan dan produktif akan semakin banyak pendapatannya, tapi yang lahannya sedikit juga tidak begitu besar dampaknya”.

(Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Juli 2019 di Desa Tanjung Beringin)

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa peningkatan angkatan kerja memang berdampak nyata dengan adanya perusahaan. Relasi yang terbentuk menyebabkan terbukanya lapangan usaha atau pekerjaan bagi masyarakat sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras.

3. Peningkatan Kemandirian Sumber Daya Manusia

Peningkatan kemandirian sumber daya manusia adalah keberdayaan masyarakat untuk mengupayakan kesejahteraan secara ekonomi dan sosial¹⁴. Kemandirian sumber daya manusia dianggap penting dan masuk dalam indikator kesejahteraan masyarakat hal ini dikarenakan modal sumber daya manusia mampu meningkatkan taraf hidup yang lebih mapan, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, agama, dan sebagainya.

Menurut Rahmatiah¹⁵, modal manusia mengacu pada kumpulan pengetahuan dan keterampilan yang melekat pada kemampuan individu untuk melaksanakan pekerjaan yang kemudian menghasilkan ekonomi. Dalam konteks ekonomi, pengembangan modal manusia diarahkan berbasis pengetahuan (*intellectual capital*) dan keterampilan (*life skill*) yang merupakan komponen dasar modal manusia dan memiliki peran sentral untuk memacu pembangunan yang kompetitif dan bersaing. Dari pengetahuan dan keterampilan pula, insan kreatif tumbuh dan berkembang.

Menurut Mulyadi, kemandirian SDM dapat ditingkatkan melalui program pendidikan, pelatihan, memberikan keterampilan praktis, menumbuhkan sikap produktif serta mendorong semangat keswadayaan dan

¹⁴ Kemeperin.go.id (2017). SDM Industri Aset Kemandirian diakses pada <https://kemenperin.go.id/artikel/18000/Menperin:-SDM-Industri-Aset-Kemandirian-Ekonomi>

¹⁵ Rahmatiah, (2017), *Relasi Sosial dalam Pengembangan Industri Kecil Menengah*, Gorontalo: Ideas Publishing.

kemandirian untuk bersama melepas diri dari kemiskinan¹⁶.

Untuk mengidentifikasi peningkatan kemandirian sumber daya manusia maka dilakukan wawancara kepada Kepala Desa Tanjung Beringin. Menurut Bapak Syafri yang merupakan Desa Tanjung Beringin mengatakan:

“Kegiatan untuk kemandirian ini masyarakat ada dilakukan pembinaan kepada masyarakat seperti dengan adanya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, program pelatihan dari desa sebenarnya banyak juga bekerjasama dengan pemerintah, hanya saja untuk kerjasama khusus dengan PT. MM belum ada sejauh ini. Mungkin perusahaan ada bekerjasama atau melakukan secara mandiri, tapi pelaporan ke desa belum ada saya lihat”. **(Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Juli 2019 di Kantor Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras).**

Ditambahkan menurut Bapak Yanto, S.Pd yang merupakan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Beringin mengatakan:

“Pelatihan untuk meningkatkan kemandirian ini sudah banyak dilaksanakan salah satunya pelatihan untuk produktivitas tani/kebun karena masyarakat disini banyak yang berprofesi sebagai petani, pelatihan untuk ibu-ibu juga ada yang lebih mengarahkan industri kreatif. Tapi belum ada yang direlasikan pelatihannya oleh PT. Musim Mas, jadi kalau SDM memang

ada program pemerintah desa ya”. **(Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Juli 2019 di Kantor Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras).**

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa pelatihan yang dilaksanakan untuk upaya peningkatan kemandirian sumber daya manusia yang dilihat dari pelatihan-pelatihan umumnya dilaksanakan oleh pemerintah desa atau dikembangkan dari program-program pemerintah setempat dan belum ada yang bekerjasama secara khusus dengan pihak perusahaan. Selanjutnya dari wawancara yang dilakukan kepada pihak perusahaan diketahui bahwa sebagai berikut:

“Untuk peningkatan mutu SDM kami adakan pelatihan ini ada tujuannya dan kita sesuaikan dengan momentumnya, misalnya kami melaksakan pelatihan lahan tanpa bakar. Program itu kita realisasikan di Desa Tanjung Beringin, Talau dan Betung karena ini gunanya untuk menumbuhkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat agar tidak lagi membuka lahan baru dengan sistem bakar sehingga kebakaran hutan bisa dicegah. Tahap awal masing-masing desa untuk melakukan buka lahan tanpa bakar seluas 5 hektar, jadi nanti kita akan mengajak masyarakat juga melakukan penebasan sehingga sisa hasil cacahan kita berikan mesin untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai kompos. Kompos ini bisa menjadi pupuk untuk lahan yang ditanami. Siklus ini lebih sehat dan hemat energi. Namun, untuk pelatihan ini kita memang belum bekerjasama dengan desa, tapi

¹⁶ Mulyadi (2013), *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

langung ke Universitas Riau waktu itu, jadi bersama mahasiswa kita mentaja kegiatan ini selama tiga hari. Kalau pelatihan yang dibina bersama desa belum ada sejauh ini” **(Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Juli 2019 di PT. Musim Mas).**

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa dalam bentuk pelatihan PT. Musim Mas telah mengadakan program pelatihan untuk mencegah kebakaran hutan yang bekerjasama dengan Universitas Riau. Namun, belum ada program yang dilaksanakan secara relasional dengan aparatur Desa Tanjung Kuras. Pelatihan yang dilaksanakan sebelumnya juga dapat diketahui dilaksanakan tidak hanya pada satu desa, hal ini dikarenakan misi perusahaan itu sendiri. Identifikasi lebih lanjut, dalam upaya peningkatkan kemandirian sumber daya manusia tidak hanya dilaksanakan dalam bentuk pelatihan tetapi juga dalam pembentukan pola kerjasama kemitraan koperasi (KKPA). Humas PT. Musim Mas menurut Bapak Jeremy Liu yang merupakan Manager Hubungan Masyarakat PT. Musim Mas mengatakan:

“Selain pelatihan, ada juga peran KKPA yang sudah disinergikan dengan masyarakat sekitar puluhan tahun lalu, jadi KKPA ini kita lakukan untuk mendorong masyarakat meningkatkan kebunnya, melalui koperasi modal dan pengembangan produksi kebun akan semakin kuat. Boleh di cek kebenarannya, sekarang KKPA dengan PT. Musim Mas sudah merangkul lebih dari seribu kepala keluarga dengan luas lahan

lebih dari dua ribu hektar, ini bukan di Desa Tanjung Beringin saja, tapi ada di desa lain juga. Nah, kalau kita tinjau dari pendapatan masyarakat sebelum KKPA itu mungkin dibawah tiga juta rupiah per bulan, sedangkan 2019 ini sudah rata-rata diangka delapan juta rupiah per bulan. Tapi angka ini variatif ya tergantung kebun yang dikelola juga, saya hanya memberikan gambaran saja.” **(Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Juli 2019 di PT. Musim Mas).**

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdapat upaya peningkatan kemandirian lain yang dilakukan oleh PT. Musim Mas adalah dengan membangun KKPA untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan kas desa. Berdasarkan data sekunder dari pihak perusahaan, diketahui bahwa KKPA adalah Kredit Koperasi Primer Anggota yang dibangun oleh PT. Musim Mas dalam bentuk kerjasama pola plasma inti yaitu dengan melakukan pengelolaan lahan, tanam hingga perawatan sampai produksi lalu diserahkan kepada PT. Musim Mas.

Pihak perusahaan menetapkan *margin* atau tingkat harga sehingga tidak tergantung pada harga pasar yang cenderung *fluktuatif* (naik-turun). Hal ini lah yang kemudian membantu stabilitas perekonomian masyarakatan setempat. Harga yang fluktuatif dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, misalnya seperti harga pasar. Harga pasar yang cenderung naik turun membuat masyarakat memilih untuk melakukan kemitraan dengan PT. Musim Mas daripada menjual ke

tengkulak setempat yang menyesuaikan dengan *margin* pasar.

Hambatan-Hambatan Terkait Relasi Desa Dengan PT. Musim Mas

1. Komunikasi antara Perusahaan dengan Aparatur Desa

Permasalahan komunikasi antara pihak atau aktor yang terlibat dalam relasi yaitu aparatur desa, perusahaan dan masyarakat adalah faktor utama yang menghambat suksesnya jalinan relasi antar ketiganya. Komunikasi merupakan proses penyampaian dan penerimaan simbol yang bermakna, seperti informasi, pemikiran, pengetahuan dan lain-lainnya, yang disampaikan oleh satu pihak ke pihak lainnya¹⁷.

Komunikasi merupakan faktor yang penting dalam relasi interpersonal. Intensitas komunikasi antara aktor yang terlibat akan mempengaruhi sudut pandang seseorang atau perspektif seseorang terhadap sesuatu. Hasil wawancara kepada Kepala Desa Tanjung Beringin. Menurut Bapak Syafri yang merupakan Desa Tanjung Beringin mengatakan:

“Program yang dilaksanakan perusahaan kadang ada yang kita ketahui dan ada yang kita tidak ketahui. Karena kadang ada yang terlapor ada yang tidak, secara administratif harus dilaporkan semua, jadi kita tahu perkembangannya, tapi yang sifatnya sosial koordinasinya kadang tidak begitu baik misalnya seperti pelatihan-pelatihan tadi, PT.MM kadang tidak mengajak semua orang di Balai Desa”.
(Wawancara dilakukan pada

tanggal 25 Juli 2019 di Kantor Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras).

Ditambahkan menurut Bapak Yanto, S.Pd yang merupakan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Beringin mengatakan:

“Ada banyak kegiatan pembinaan untuk kesejahteraan tapi kadang mengeksekusinya tidak semudah itu, kalau melakukan rapat misalnya, koordinasi sedikit sulit, pihak perusahaan punya kesibukan, mereka kalau mau bikin program diagendakan dulu tidak bisa dadakan, masalah kadang datang hari ini, tapi eksekusinya bisa setahun lagi karena semua ada prosedur. Masyarakat ada yang mengeluh minta bantuan perusahaan memperbaiki jalan tahun 2017 lalu, sekarang 2019 baru bisa diperbaiki, dilaporkan dahulu, kalau kita tidak dekat dengan orang manajemen perusahaan tentu jadi lebih lambat realisasinya karena permintaan seperti itu ada prosesnya, sedangkan kondisinya masyarakat dengan dengan perusahaan tidak begitu dekat, masyarakat mengadu ke pemerintah desa untuk menyampaikan aspirasinya. Jadi ini masih menjadi tugas bersama”.
(Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Juli 2019 di Kantor Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras).

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa komunikasi antara pihak desa, masyarakat terhadap PT. Musim Mas belum berjalan intensif karena adanya kendala-kendala dan kurangnya kedekatan antara pihak.

¹⁷ Bimo Walgito, (2010), *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Jemery Liu sebagai berikut:

“Benar, koordinasi itu penting sekali, kita memang sedikit ada kendala disitu, sebenarnya kepala Desa sudah pernah menyarankan kepada PT.Musim Mas untuk ada agenda tri wulan atau semesteran untuk evaluasi pengelolaan CSR, tapi kita belum bisa wujudkan dalam satu triwulan, baru untuk tahunan kita bisa diskusikan. Karena kita juga ada evaluasi tidak hanya di Desa Tanjung Beringin saja. Tapi untuk evaluasi kami selalu penuh minimal sekali dalam setahun” **(Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Juli 2019 di PT. Musim Mas).**

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa komunikasi yang dibentuk adalah dalam bentuk rapat atau diskusi bersama pihak Desa Tanjung Beringin. Komunikasi yang terjalin dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa belum intensif karena kedua belah pihak belum cukup membuat relasi kedua pihak menjadi lebih dekat. Hal ini sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Wiryanto, komunikasi dalam politik yang intensif akan mampu menciptakan dan memelihara relasi menjadi lebih bermakna. Komunikasi antar pribadi yg kita lakukan banyak bertujuan untuk menciptakan dan memelihara hubungan yg baik dengan orang lain. Hubungan tersebut membantu mengurangi kesepian dan ketegangan serta membuat kita lebih positif tentang diri kita sendiri¹⁸.

2. Target Program Perusahaan

¹⁸ Wiryanto, (2014), *Pengantar Ilmu Komunikasi Politik*, Jakarta: PT. Grasindo

Target program yang direncanakan dengan baik akan mempengaruhi relasi Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras dengan PT Musim Mas. PT Musim Mas melakukan kegiatan sosial dalam pengembangan Desa seperti program CSR umumnya lakukan rapat internal terlebih dahulu sebelum membahas atau mengajak pihak Desa untuk terlibat dalam pelaksanaan program CSR.

Menurut Bapak Jeremy Liu selaku Manajer Hubungan Masyarakat PT. Musim Mas mengatakan:

“Untuk program-program yang akan melibatkan partisipasi masyarakat itu kita sesuaikan targetnya dulu, visi program dan misi programnya secara internal, untuk kebaikan bersama pasti kita melibatkan pihak kantor Desa Tanjung Beringin, kalau program itu ada yang rutin tahunan, ada yang sesekali, untuk program tahunan tidak hanya khusus di Desa Tanjung Beringin tapi pada Kecamatan Pangkalan Kuras jadi akan kita alokasikan anggaran pertahun di berbeda Desa”. **(Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Juli 2019 di PT. Musim Mas).**

Ditambahkan menurut Bapak Yudi selaku Tokoh Masyarakat Desa Tanjung Beringin mengatakan:

“Program yang dilakukan PT. Musim Mas sudah cukup bagus, terutama KKPA itu saya rasa tepat sasaran, memang dalam mewujudkannya peran perusahaan yang besar, kalau dikaji dari relasi antara perusahaan dengan desa, menurut saya pihak Desa sebagai kontrol dan mengarahkan masyarakat untuk terlibat dalam koperasi itu sudah bagus juga,

sehingga masyarakat terpicu untuk bekerja lebih aktif mengolah lahan perkebunannya, tentu pada akhirnya masyarakat juga yang hasil panennya jadi lebih banyak. Kendala yang ditemui untuk program ini kalau saya lihat adalah targetnya hanya untuk ekonomi saja, jadi masyarakat tahu cara kerja saja, sebaiknya pemerintah desa dengan PT itu mulai diarahkan bagaimana memproduksi lebih banyak tapi tanah tidak rusak apalagi sawit kan, jadi pengolahan tanah harus lebih diperhatikan. Target programnya mungkin untuk pendidikan bertaninya perlu ditingkatkan, jadi masyarakat tidak kerja saja tapi juga semakin cerdas mengolah lingkungannya". **(Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Juli 2019 di Desa Tanjung Beringin)**

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa target program perusahaan yang umumnya bersifat peningkatan ekonomi melalui koperasi namun belum ada program-program khusus dalam peningkatan sosial, program pemindahan isolasi wilayah, dan peningkatan SDM.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya tentang Dampak kehadiran perusahaan perkebunan PT. Musim Mas di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras dalam penelitian ini ditinjau dari beberapa aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial masyarakat desa dapat dikategorikan belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari indikator yang digunakan untuk

melihat Dampak yang terjadi antara perusahaan, apartur desa dan masyarakat desa yakni: a) Pada pembenahan fasilitas kesehatan yang masih kurang yaitu hanya terdapat satu puskesmas pembantu atau posyandu saja dan tidak adanya fasilitas layanan kesehatan dasar seperti puskesmas, peningkatan pembangunan yang belum berkembang yang dilihat dari hanya terdapat satu buah bangunan sekolah dasar, peningkatan SDM belum terjalin komunikasi yang efektif antara aparatur desa dengan pihak perusahaan karena beberapa program pelatihan yang dijalankan tidak melibatkan banyak koordinasi antara pihak perusahaan dan pemerintah desa Tanjung Beringin, b) Banyak juga dampak negatif yang terjadi dari hadirnya PT. Musim Mas di desa, seperti terkikisnya nilai-nilai budaya dan agama masyarakat desa, c) Hambatan utama dari hubungan desa dengan PT. Musim Mas adalah komunikasi yang belum intensif, sehingga ditakutkan target program perusahaan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adi, Isbandi Rukmiyanto. 2013. *Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Bugin Burhan, 2003, *Analisis data penelitian kualitatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Emzar, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Press.

- Pardamean, Maruli. 2011. *Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Bryant, Coralie & Louise G. White. 1987. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta: LP3ES
- Widjaja, Haw. 2014. *Otonomi Desa*. Jakarta : Grafindo Persada
- Eko, Sutoro. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. IRE Press
- Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- W Gulo. 2005. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta : Gramedia
- B. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 3 tahun 2011 tentang pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1982 tetang wajib daftar perusahaan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tetang Desa
- Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) mengenai tentang hak-hak atas tanah, air, dan udara